

PENGARUH KEBIJAKSANAAN APBD DAN KEMISKINAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MC. KHUZAIRONI

NIM 12020110130062

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mc. Khuzaironi
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130062
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKSANAAN APBD
DAN KEMISKINAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Miyasto, SU

Semarang, 16 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Miyasto, SU.)
NIP 19501225 197501 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Mc. Khuzaironi
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130062
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKSANAAN APBD
DAN KEMISKINAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 September 2015

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Miyasto, SU. (.....)

2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. (.....)

3. Nenik Woyanti, S.E.,M.Si. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, S.E.,M.com.,Ph.D.,Akt.
NIP 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Mc. Khuzaironi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan

(Mc. Khuzaironi)

NIM : 12020110130062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Shabara Zhafira (Barangsiapa yang bersabar akan beruntung)

“Pelajarilah ilmu.

Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.

Menuntutnya, itu ibadah.

Mengulang-ulangnya, itu tasbih.

Membahasnya, itu jihad.

Mengajarkannya orang yang tidak tahu, itu sedekah.

Memberikan kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada
Tuhan.”

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban & Ibnu Abdul Barr, Ilya Al-Ghozali)

Kehidupan tidak membutuhkan kita jadi yang terbaik, hanya
membutuhkan kita telah melakukan hal yang terbaik

(H. Jackson Brown, Jr.)

*Skripsi ini Aku persembahkan untuk Bapak, Ibu,
Kakak, Adik dan orang-orang terkasih dalam hidupku.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of the fiscal policy (APBD) consist is fiscal capacity, capital expenditure and budgeting and poverty toward social welfare of 35 regencies/cities in Central Java Province for five years (2009-2013). The method used in this study is panel data with random effect model approach, and using secondary data types.

The analysis concluded that fiscal capacity, capital expenditure, budgeting and poverty significant effect toward social welfare. Poverty is a most influential variable toward social welfare variable. During five years of implementation of the fiscal policy in Central Java Province could be proved that the empirical, the fiscal policy make social welfare of 35 regencies/cities in Central Java Province, increased every year.

Keywords : Fiscal Capacity, Capital Expenditure, Budgeting, Poverty, Social Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijaksanaan fiskal (APBD) yang terdiri dari kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah serta kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2009-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan model efek acak (*random effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, pembiayaan daerah dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah secara empirik dapat dibuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat tiap tahunnya.

Kata Kunci : Kapasitas Fiskal, Belanja Modal, Pembiayaan Daerah, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, hidayah serta i'adahNya serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan barokah beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEBIJAKSANAAN APBD DAN KEMISKINAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyusun skripsi ini atas usaha, bantuan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Suharnomo, S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan Dekan sebelumnya Prof. Drs. H. Moh. Nasir, M.Si.,Akt.
2. Bapak Prof. Dr. H. Miyasto, SU, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajarkan dan membimbing penulis dengan sabar dan telaten, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE.,M.Si. selaku Dosen Wali, terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, dorongan, perhatian, kesabaran serta waktu yang diberikan selama proses perkuliahan sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfa'at serta seluruh Staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu (Mc. Chilmi dan Andayani) serta Kakak dan Adikku sekalian yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, kebersamaan, semangat, dan dorongan baik secara moril maupun materiil di sepanjang waktu hingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1).
6. Abah K.H. Sam'ani Khoiruddin, S.Ag. serta Keluarga Besar Pondok Pesantren Kyai Galang Sewu (Rohman, Amin, dan seluruh santri putra putri Pondok Pesantren Kyai Galang Sewu).
7. Miftakhul 'Ulya Rimadhani, yang selalu memberikan dorongan, nasihat dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, serta teman karib dari masa kanak-kanak hingga kuliah yang seperjuangan namun tidak senasib (A. Ulil Khodlro) dan teman-teman Madrasah Qudsiyyah lainnya.
8. Teman-teman Anggota Iyik Family (Risky, Danu, Tyo, Anas, Candra, Meiriza, Melia, Bramudya) serta teman-teman yang membantu menyelesaikan skripsi (Rizky, Danu, Aditya Emka, Adit Fairuz, Aang, Nisa, Eta, Ian), serta Aron, Musa, Ghalib, Yani, Wida, Eka dan semua teman-teman IESP angkatan 2010.

9. Teman, kakak-kakak dan adik-adik seperjuangan (Herlan, Mbak Febri, Mas Ucup, Yunita, Intan, Mas Mario, dll).
10. Teman-teman KKN (Bobby, Dhika, Faisal, Dian, Siska, Kenida, Tya, Nicko, Anisa, Embun, Bang Kijo, Arief, Kukuh, Jenni).
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kelemahan dan kekurangan, maka apabila ada kritik dan saran akan diterima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini memberikan manfa'at dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 16 Agustus 2015

Penulis,

Mc. Khuzaironi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori.....	18

2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian.....	18
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	21
2.1.3 Penerimaan Pemerintah Daerah.....	25
2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.1.3.2 Dana Perimbangan.....	27
2.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	28
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah.....	29
2.1.4.1 Hukum Wagner.....	30
2.1.4.2 Teori Erick Lindahl.....	32
2.1.4.3 Teori Makro.....	33
2.1.5 Kemiskinan.....	34
2.1.5.1 Indikator Kemiskinan.....	35
2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat.....	36
2.1.6.1 Komponen-Komponen IPM.....	39
2.1.6.2 Indeks Harapan Hidup.....	41
2.1.6.3 Indeks Pendidikan.....	41
2.1.6.4 Indeks Standar Hidup Layak.....	42
2.1.7 Kebijakan APBD & Kesejahteraan Masyarakat..	43
2.1.8 Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat.....	46
2.2 Penelitian Terdahulu.....	48
2.3 Kerangka Pemikiran.....	52
2.4 Hipotesis.....	52

BAB III	METODE PENELITIAN.....	54
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	54
3.1.1	Variabel Penelitian.....	54
3.1.2	Definisi Operasional.....	54
3.2	Populasi Penelitian.....	57
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3.1	Jenis Data.....	57
3.3.2	Sumber Data.....	58
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	58
3.5	Metode Analisis Data.....	59
3.5.1	Estimasi Model Regresi.....	62
3.5.2	Pengujian Asumsi Klasik.....	64
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	64
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas.....	64
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	65
3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	66
3.5.3	Pengujian Statistik.....	67
3.5.3.1	Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)....	67
3.5.3.2	Uji Statistik t (Uji t).....	68
3.5.3.3	Uji Statistik F (Uji F).....	69
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	70
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Prov. Jawa Tengah.....	70

4.1.2	Kebijaksanaan Fiskal Provinsi Jawa Tengah.....	72
4.1.3	Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.....	78
4.1.4	Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah....	81
4.2	Analisis Data.....	83
4.2.1	Pengujian Kelayakan Analisis Regresi.....	83
4.2.1.1	Uji Normalitas Data.....	83
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas.....	84
4.2.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	84
4.2.1.4	Uji Autokorelasi.....	86
4.2.2	Hasil Analisis Regresi.....	87
4.2.2.1	Estimasi Model Regresi.....	87
4.2.2.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	89
4.2.2.3	Uji Statistik t (Uji t).....	89
4.2.2.4	Uji Statistik F (Uji F).....	90
4.3	Interpretasi Hasil.....	91
4.3.1	Pengaruh Variabel Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	91
4.3.2	Pengaruh Variabel Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	92
4.3.3	Pengaruh Variabel Alokasi Belanja Modal terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat...	93
4.3.4	Pengaruh Variabel Pembiayaan Daerah terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	95

4.3.2 Pengaruh Variabel Kemiskinan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	96
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Keterbatasan.....	100
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
Negara-negara ASEAN Tahun 2013.....	3
Tabel 1.2 APBD 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	9
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	40
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 4.1 Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Tengah.....	72
Tabel 4.2 Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah.....	74
Tabel 4.3 Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	77
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah.....	79
Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah.....	81
Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	83
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Collinearity Statistics</i>	84
Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser.....	86
Tabel 4.9 Hasil Uji Nilai Durbin-Watson.....	87
Tabel 4.10 Estimasi Model Regresi Kesejahteraan Masyarakat.....	88
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t ($\alpha = 0,05$) Persamaan KM.....	90
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik F ($\alpha=0,05/\text{Sig.}=0,000$) Persamaan KM.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah.....	5
Gambar 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin.....	6
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.....	32
Gambar 2.2 Kurva Indifferens.....	32
Gambar 2.3 Solusi Erick Lindahl.....	33
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Durbin-Watson.....	67
Gambar 3.2 Daerah kritis dan penerimaan suatu hipotesis.....	69
Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	70
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah.....	70
Gambar 4.3 Hasil Grafik <i>Scatterplot</i>	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Mentah.....	106
Lampiran B Data Konversi.....	114
Lampiran C Hasil Analisis Regresi & Uji Statistik.....	122
Lampiran D Hasil Uji Asumsi Klasik.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai Negara kepulauan yang besar butuh suatu strategi pemerintahan yang tepat dan sesuai untuk diterapkan guna mencapai pembangunan dan kesejahteraan Indonesia secara merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar kepada semua bidang pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin baik (Depkeu RI, 2008). Namun, karena sering terlambatnya pengesahan APBD sekalipun pemerintah pusat telah berulang kali menghimbau di ujung setiap akhir tahun anggaran, yang berdampak terhadap pembangunan pada tahun berikutnya terhambat dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal akan berimbas buruk juga pada realisasi pembangunan di daerah. Maka dari itu, pada ujung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono disahkan undang-undang baru tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 (KPPOD).

Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004). Kebijakan program dan penganggaran yang terencana akan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *trickle down effect*.

Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Ginting dalam Usualiadanti, 2011). Pemerintah pusat sebagai pemangku kepemimpinan Negara Indonesia tentunya harus bertanggung jawab atas hal tersebut, dimana pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata di semua wilayah di Indonesia.

Pembangunan manusia merupakan masalah yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Tinggi rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu mengukur perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, demikian hasil evaluasi awal yang dilakukan oleh UNDP melalui proyek penguatan *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) Pemerintah Indonesia dan Badan Kerjasama Internasional Jerman (GIZ). Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga (pgsp-agi.org). Peringkat dari nilai IPM negara-negara ASEAN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara ASEAN
Tahun 2013

No.	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan Peringkat IPM 2008-2013	Rata-rata Pertumbuhan IPM (%) 2000-2013	Kelompok
1	Singapura	0,901	9	14	0,92	Very High
2	Brunei Darussalam	0,852	30	2	0,27	Very High
3	Malaysia	0,773	62	1	0,58	High
4	Thailand	0,722	89	3	0,83	High
5	Indonesia	0,684	108	4	0,90	Medium
6	Filipina	0,660	117	-1	0,49	Medium
7	Vietnam	0,638	121	2	0,81	Medium
8	Timor Leste	0,620	128	5	2,25	Medium
9	Kamboja	0,584	136	-1	1,75	Medium
10	Laos	0,569	139	3	1,44	Medium
11	Myanmar	0,524	150	0	1,69	Low

Sumber : UNDP, 2014

Dari Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian IPM Indonesia pada tahun 2013 masih menduduki peringkat 108 dari 187 negara dan termasuk kategori *medium human development* dengan skor IPM sebesar 0,684 yang meningkat sebesar 0,30 dari 0,654 yang dicapai pada tahun 2008 dengan perubahan sebesar 0,90 % dari tahun 2000 - 2013, naik 4 peringkat. Posisi Indonesia di kalangan negara-negara ASEAN berada jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 9, diikuti oleh Brunei Darussalam pada peringkat 30, Malaysia di peringkat 62 dan Thailand pada peringkat 89 yang sudah masuk kategori *high human development*. Sedangkan peringkat terendah diduduki oleh Myanmar yang berada di peringkat 150 dengan kategori *low human development*.

Rendahnya pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia ini salah satunya karena rendahnya kinerja pencapaian kesejahteraan masyarakat pada skala pembangunan daerah (Kusreni dan Suhab, 2009). Hal ini karena masih belum efektif dan meratanya alokasi pembangunan pada setiap daerah.

Gambar 1.1
Rata-rata IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013

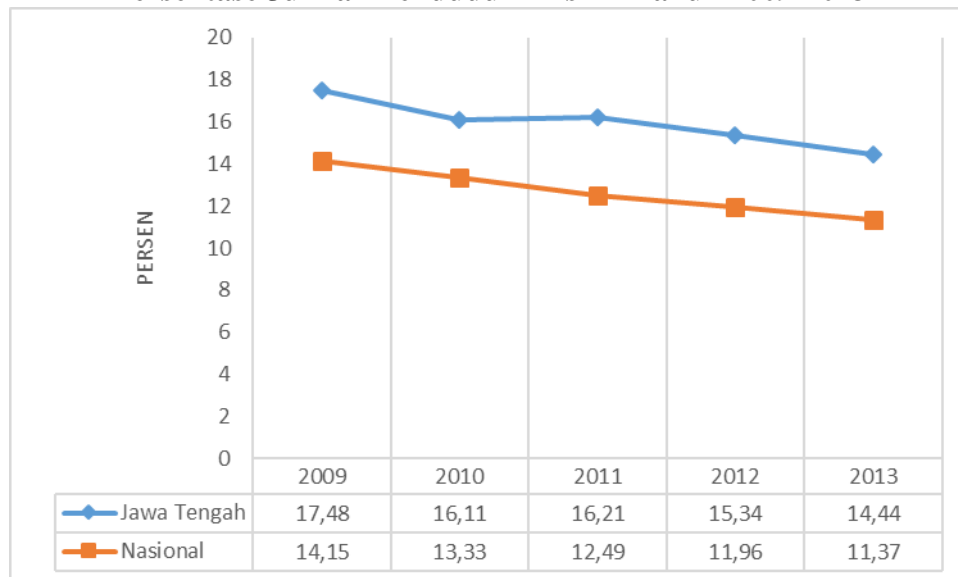


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2015

Provinsi Jawa Tengah, tingkat pembangunan manusianya diatas rata-rata pembangunan nasional, terlihat pada Gambar 1.1 bahwa rata-rata nilai IPM di Jawa Tengah mengalami kenaikan terus menerus dari sebesar 72,01 pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 73,85.. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan.

Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus mengalami kenaikan, akan tetapi kondisi kemiskinan yang ada di Jawa Tengah masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tingginya tingkat kesejahteraan tersebut mungkin sebagian besar dinikmati oleh golongan menengah atas. Faktor pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pembangunan dari suatu daerah.

Gambar 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2009-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2013

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahunnya, yakni mulai dari 17,48 persen pada tahun 2009 menurun hingga 14,44 persen pada tahun 2013, namun penurunan jumlah penduduk miskin tersebut masih berada dibawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional, yaitu sebesar 11,37 pada tahun 2013. Berdasarkan data tahun terakhir dari Badan Pusat Statistik Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 4.704.870 jiwa penduduk miskin dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebesar 4.865.820 jiwa penduduk miskin.

Pembangunan ekonomi diantaranya bertujuan mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta berujung pada

pengentasan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengertian dari kemiskinan dalam arti luas merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut (Siregar, 2007).

Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dari kualitas pembangunan manusia, yakni mengenai pengeluaran pemerintah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan pencapaian sasaran pembangunan yang optimal di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kebijaksanaan ini diharapkan IPM yang tinggi dengan efisien dan efektif akan terwujud.

Salah satu instrumen dari kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan pengaturan distribusi dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Menurut Tang (2015), semakin besar sumber daya birokrasi negara, yaitu keadaan keuangan suatu negara akan semakin besar perluasan pengeluaran publik untuk program kesejahteraan sosial. Hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan

dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Namun seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah pada APBD serta pelaksanaan otonomi daerah selama beberapa tahun, ternyata belum tampak perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Paramitha, 2012). Ini terlihat jelas pada kebijakan APBD yang menjadi instrumen induk untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, dimana alokasi dan realisasi anggaran lebih sering didominasi oleh kepentingan belanja rutin birokrasi, terutama untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah, biaya kantor dan biaya perjalanan dinas. Sehingga pengalokasian anggaran yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan kualitas pembangunan manusia menjadi kurang efektif.

Peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Kusreni dan Suhab, 2009). Kebijaksanaan tersebut tercermin dalam tiga kebijaksanaan pokok yaitu, kebijaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk mengamati seberapa besar ketiga kebijaksanaan APBD tersebut dalam berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013.

Tabel 1.2
APBD 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (dalam juta)

Daerah	Pendapatan					Belanja					Pembiayaan				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Banjarnegara	685.505	717.108	984.557	1.086.888	1.188.466	729.036	751.601	1.025.450	1.147.280	1.234.964	48.502	34.492	41.253	60.392	46.498
Kab. Banyumas	994.246	1.060.125	1.446.407	1.615.920	1.833.089	1.112.316	1.120.297	1.531.621	1.786.935	2.098.444	118.070	60.171	85.215	171.015	265.355
Kab. Batang	5.735.555	568.440	730.426	866.375	990.366	611.715	601.703	768.577	915.743	1.049.361	39.992	33.263	38.151	49.368	58.995
Kab. Blora	714.065	770.231	940.041	1.057.137	1.238.973	871.730	845.449	1.024.630	1.203.753	1.385.468	157.666	75.218	84.589	146.615	146.495
Kab. Boyolali	820.831	912.315	1.038.988	1.172.995	1.355.584	880.086	964.590	1.103.339	1.232.584	1.422.890	59.255	52.275	64.351	59.588	67.307
Kab. Brebes	965.616	1.109.087	1.302.465	1.434.891	1.680.179	1.043.264	1.221.167	1.428.603	1.579.785	1.890.997	77.648	112.080	126.138	144.894	210.817
Kab. Cilacap	1.092.960	1.204.549	1.301.980	1.734.391	1.976.249	1.142.689	1.237.942	1.354.900	1.835.746	2.073.241	49.728	33.393	52.920	101.356	96.992
Kab. Demak	682.660	756.158	968.295	1.070.310	1.252.019	739.360	805.850	1.040.197	1.174.869	1.312.467	56.700	49.692	71.902	104.559	60.448
Kab. Grobogan	779.646	870.280	1.068.529	1.229.491	1.450.053	817.577	873.480	1.152.682	1.261.374	1.536.803	37.930	3.200	84.154	31.883	86.750
Kab. Jepara	772.922	789.163	978.513	1.174.266	1.255.016	804.539	817.087	1.033.453	1.247.081	1.351.036	31.617	27.924	54.940	72.815	96.021
Kab. Karanganyar	719.200	750.399	870.550	1.092.509	1.274.580	799.688	794.316	901.207	1.169.470	1.346.189	80.488	43.917	30.657	76.960	76.609
Kab. Kebumen	863.968	919.068	1.140.548	1.319.067	1.597.038	993.216	999.054	1.154.243	1.378.375	1.634.459	129.248	79.986	13.694	59.308	37.422
Kab. Kendal	736.016	797.919	958.983	1.123.094	1.327.091	799.716	828.122	1.016.191	1.164.277	1.383.805	63.700	30.204	57.208	41.183	56.715
Kab. Klaten	955.238	1.025.517	1.218.358	1.409.831	1.564.769	1.023.033	1.028.962	1.299.874	1.434.610	1.628.485	67.795	3.445	81.517	24.780	63.715
Kab. Kudus	822.456	797.346	910.541	1.102.466	1.333.611	900.715	916.230	971.632	1.191.125	1.294.480	78.258	119.000	61.091	88.659	47.000
Kab. Magelang	830.159	886.037	1.062.532	1.238.887	1.324.510	911.933	1.017.192	1.169.089	1.361.296	1.511.729	81.774	131.154	106.556	122.409	188.343
Kab. Pati	858.471	896.953	1.036.496	1.329.897	1.594.792	985.496	1.016.595	1.169.111	1.486.559	1.775.345	127.025	119.642	132.615	156.662	180.553
Kab. Pekalongan	654.708	689.227	866.509	1.033.549	1.155.299	697.229	707.030	898.873	1.048.549	1.220.443	42.521	17.803	32.364	14.999	65.144
Kab. Pemalang	711.812	828.586	969.382	1.209.673	1.353.367	769.847	878.511	990.698	1.247.475	1.476.290	58.035	49.926	21.316	37.802	122.923
Kab. Purbalingga	697.159	691.260	865.161	1.048.121	1.119.615	702.705	708.423	883.858	1.098.394	1.127.382	5.545	17.162	18.697	50.273	7.767

Kab. Purworejo	712.655	720.844	896.461	1.055.739	1.201.331	754.722	775.422	945.182	1.113.878	1.258.566	48.480	54.578	48.721	58.139	57.234
Kab. Rembang	585.125	615.076	759.842	991.501	1.108.078	593.546	629.791	800.888	996.747	1.121.778	8.421	17.715	41.046	5.246	13.700
Kab. Semarang	745.450	765.623	945.858	1.093.397	1.121.321	787.322	777.835	942.876	1.100.606	1.137.175	59.532	12.211	-2.982	7.209	15.855
Kab. Sragen	749.811	788.505	987.162	1.177.198	1.383.879	810.434	857.901	1.044.565	1.228.610	1.378.179	60.623	69.395	57.403	51.411	5.700
Kab. Sukoharjo	693.939	733.760	880.459	1.086.794	1.217.966	740.005	781.475	919.539	1.105.748	1.274.312	46.587	47.715	39.080	18.953	56.346
Kab. Tegal	825.563	888.542	1.113.873	1.237.540	1.421.102	913.245	927.856	1.129.607	1.290.490	1.475.011	87.682	39.314	15.734	52.950	53.909
Kab. Temanggung	578.858	618.195	723.104	935.615	991.507	609.738	646.510	726.783	874.427	1.102.507	34.280	28.316	9.050	-4.600	111.000
Kab. Wonogiri	826.254	879.303	1.047.666	1.241.149	1.418.726	977.243	975.858	1.118.484	1.331.062	1.510.810	153.560	102.827	70.818	89.914	92.084
Kab. Wonosobo	610.152	679.905	865.396	920.183	1.028.178	632.221	679.607	893.769	1.001.910	1.100.870	29.339	-299	28.373	81.727	72.692
Kota Magelang	375.119	372.364	435.897	530.014	575.858	471.234	416.607	467.712	569.826	617.028	99.057	44.276	31.977	45.797	41.170
Kota Pekalongan	377.279	383.654	448.124	544.624	616.879	390.965	414.803	474.695	560.002	638.975	13.686	31.149	26.571	15.378	22.096
Kota Salatiga	348.176	358.547	429.996	505.010	578.437	430.982	403.924	477.423	571.682	655.344	82.807	45.376	47.426	66.672	76.907
Kota Semarang	1.369.671	1.378.070	1.713.581	2.203.477	2.421.734	1.604.783	1.679.072	2.021.102	2.193.614	2.657.023	235.112	-8.900	307.520	-9.863	235.289
Kota Surakarta	772.784	828.635	1.003.624	1.140.988	1.376.303	842.538	838.253	1.069.115	1.198.484	1.402.670	69.754	9.618	65.491	57.496	26.367
Kota Tegal	390.650	398.091	440.674	591.095	647.639	478.915	454.855	518.175	600.014	690.948	88.265	56.764	77.501	8.919	43.309
Rata-rata	887.277	784.254	952.885	1.131.545	1.284.960	810.680	839.811	1.013.376	1.191.497	1.365.014	72.248	46.972	60.659	61.739	83.015

Sumber : DJPK Kemenkeu RI 2015

Secara umum Struktur APBD terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada Tabel 1.2 rata-rata pendapatan di kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami fluktuatif, pada Tahun 2009 sebesar 887,277 miliar turun sebesar 784,254 miliar pada tahun 2010 kemudian meningkat hingga tahun 2013 sebesar 1.284,960 miliar. Rata-rata belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan dari 810,680 miliar pada tahun 2009, meningkat sampai tahun 2013 menjadi sebesar 1.365,014 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah mengalami fluktuatif, pada Tahun 2009 sebesar 72,248 miliar turun sebesar 46,972 miliar pada tahun 2010 kemudian meningkat hingga tahun 2013 sebesar 83,015 miliar.

Pendapatan Daerah dalam penelitian ini mengambil Kapasitas Fiskal karena kapasitas fiskal merupakan yang benar-benar dihasilkan dari daerah itu sendiri. Belanja Daerah difokuskan pada belanja modal dimana belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti infrastruktur, gedung olahraga, sekolah dll), dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung pemerintahan). Sedangkan pembiayaan daerah mengambil

pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Kusreni dan Sultan Suhab (2009) tentang Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengambil variabel kapasitas fiskal, belanja modal dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2007, mendapatkan hasil bahwa kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat daripada alokasi belanja modal. Sedangkan pembiayaan daerah berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut tidak searah dengan teori keuangan publik.

Penelitian dari Rudy Badruddin (2011) tentang Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dihasilkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2012) tentang pengaruh realisasi APBD (Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan) serta Dana Alokasi Umum (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Kota Makassar tahun 2000-2009, memperoleh hasil bahwa variabel realisasi APBD (Belanja Modal dan Biaya operasional pemeliharaan) lebih berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan dengan DAK karena penggunaan anggaran DAK harus selalu sesuai dengan tujuan dan instruksi dari pemerintah pusat. Sedangkan pada realisasi APBD (Belanja Modal dan Biaya operasional pemeliharaan), pemerintah daerah/kota lebih memiliki kebebasan dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Denni Sulistio Mirza (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 yang menghasilkan kesimpulan belanja modal telah berhasil direalisasikan untuk kebutuhan barang publik guna menuju pada kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kemudian penelitian dari Hadi Sasana (2012), meneliti tentang pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabuapten/Kota Provinsi Jawa Tengah) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel pendapatan perkapita

masyarakat pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Zulia Hanum (2011) yang meneliti tentang Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai menyimpulkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai terjadi peningkatan tetapi lebih banyak diperoleh dari dana perimbangan yang artinya tingkat ketergantungan masing tinggi. Belanja daerah masih banyak diperuntukkan kepentingan aparatur sehingga kesejahteraan masyarakat masih rendah. SiLPA yang meningkat dari tahun ketahun menunjukkan belanja lebih kecil daripada pendapatan sehingga belum memihak kepada rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari tiga kebijaksanaan pokok yaitu pendapatan, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera yang penting untuk diamati seberapa besar peran dari kebijaksanaan APBD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengaruh dari kemiskinan terhadap peningkatan kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah yang mana data dibatasi pada tahun 2009-2013, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Mengingat APBD (kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, dan pembiayaan daerah) merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu permasalahan pembangunan manusia di Jawa Tengah yaitu berkaitan dengan naiknya belanja pemerintah yang tidak sebanding dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari IPM, dimana hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Pulau Jawa. Maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dari kapasitas fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh alokasi belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu ekonomi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil dari analisis data, interpretasi dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Private market biasanya mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efisien melalui mekanisme pasar, apabila tingkat efisiensi swasta benar-benar terjadi maka peran pemerintah akan sangat terbatas salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam *private market* (Samuelson dan Nordhaus, 1999). Ketika konsumen dan produsen tidak lagi mau menanggung biaya atau menghasilkan keuntungan secara penuh dari transaksi yang mereka lakukan maka dikatakan telah terjadi kegagalan pasar. Kegagalan pasar menurut Mangkoesoebroto (2008) dapat terjadi karena adanya *common goods*, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik, eksternalitas, pasar tidak penuh, kegagalan informasi, *unemployment* dan ketidakpastian. Dalam hal terjadinya kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien.

Intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui kebijakan fiskal, pertama kali dipopulerkan oleh Keynes (1936) sebagai solusi terhadap depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Pemikiran reaktif ini, diidentifikasi sebagai solusi jangka pendek. Keynes menawarkan model makro ekonomi, memandang kebijakan fiskal sebagai sisi permintaan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model makro ekonomi tersebut

menjelaskan perubahan kebijaksanaan fiskal, melalui *government expenditure* yang menyebabkan perubahan pendapatan nasional melalui efek *multiplier*.

Peran pemerintah ini dipergunakan para pemikir ekonomi selanjutnya dalam menjelaskan teori pertumbuhan /pembangunan ekonominya. Barro (dalam Kusreni dan Suhab, 2009) menekankan pentingnya peran pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal terhadap pertumbuhan pada sisi penawaran. Model ini menyatakan *output* perkapita dipengaruhi oleh modal per pekerja dan *input* dari investasi pemerintah (*government expenditure*). Cziraky (2004) menguraikan bahwa keterbatasan kapasitas produksi hanya dapat dikurangi melalui kebijaksanaan pemerintah dalam jangka panjang, peningkatan pengeluaran atau penurunan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan melalui efek *multiplier*.

Todaro dan Smith (2006) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk *social overhead* dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kapasitas perekonomian. Sejalan dengan itu, Mankiw (2003) menjelaskan bahwa dengan didorong oleh insentif kebijaksanaan fiskal, seperti pemotongan pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan masyarakat.

Ada tiga yang mendasari pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian (Boyes dalam Usaliadanti, 2011) yaitu :

1. *Public Interest Theory*

Menurut *Public Interest Theory* (teori kepentingan publik dari pemerintah) aktivitas pemerintah adalah ditunjukkan untuk

memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Sudut pandang kepentingan publik inilah yang menjadi dasar bagi Keynesian untuk merumuskan suatu kebijakan.

2. *Capture Theory*

Intervensi pemerintah terjadi karena adanya *special interest group* yang mendominasi pemerintah, bertolak belakang dengan *Public Interest Theory*, menyatakan bahwa aktivitas pemerintah ditujukan untuk keuntungan dan memaksimalkan kesejahteraan dari *special interest group* tersebut.

3. *Public Choice Theory*

The public choice of government adalah berdasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah tidak lebih merupakan kumpulan dari banyak orang atau individu yang bekerja untuk pemerintah, masing-masing individu mencoba memaksimalkan kepentingannya. Dalam sudut pandang ini pemerintah adalah sebuah organisasi yang kompleks yang terdiri dari banyak individu, masing-masing dengan tujuan yang berbeda.

Menurut Kusreni dan Suhab (2009), dalam perspektif pembangunan daerah, kebijaksanaan fiskal selanjutnya diderivasi menjadi kebijaksanaan desentralisasi fiskal. Studi empiris menunjukkan pada sejumlah negara, termasuk Indonesia, hasil yang tidak seragam, bervariasi, dan tidak konsisten antara satu dengan negara lainnya, serta antara satu daerah dengan daerah lainnya,

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, diyakini mampu menekan angka tingkat kemiskinan.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, menyebutkan bahwa penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun yang tertentu yang menjadi beban daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD akan menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut struktur APBD yang berlaku sekarang, pengeluaran daerah terdiri dari dua komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2003 Pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. UU Nomor 32 Tahun 2003 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan

umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai. (Kartiwa, 2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat kordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya

difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Sasana, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. APBD merupakan rencana kerja keuangan daerah yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

2.1.3 Penerimaan Pemerintah Daerah

Alokasi belanja atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyediaan barang-barang publik dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Aktivitas rutin pemerintah daerah tersebut antara lain dapat didanai dengan melakukan

pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang ada di daerah (Sasana, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah di setiap provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama PAD komponennya itu-itu juga yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Daerah dengan PAD yang meingkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana dari pusat. Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab peran pemerintah daerah dalam perekonomian daerah cenderung akan semakin menurun, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah fasilitator. Artinya, inisiatif memang harus datang dari masyarakat lokal yang sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah.

Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah tidak mampu mengandalkan PAD untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang diprediksikan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) masih dibutuhkan, karena disamping sebagai penambah bagi pendapatan daerah, juga sebagai instrumen penyeimbang fiskal antar daerah.

2.1.3.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

a. Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, meliputi penerimaan kehutanan, penerimaan pertambangan umum, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan minyak, penerimaan pertambangan gas alam dan penerimaan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang

selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang. Secara implisit, tujuan adanya DAU adalah untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai akibat bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata. DAU untuk suatu wilayah dialokasikan atas dasar celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar (Simanjuntak, 2005).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. DAK dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bisa dituangkan dalam bentuk formula dan variabel-variabelnya sebagaimana halnya DAU (Nurcholis, 2005).

2.1.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 mengakibatkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya adalah manifestasi dari pemerintah pusat dan bertindak atas perintah dari pusat, dengan diberlakukannya otonomi daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur wilayahnya (berdasarkan kebutuhan wilayah) dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

Sehingga dengan sistem otonomi daerah tiap wilayah kabupaten dan kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam, sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). Dalam UU No. 32 Tahun 2004, wewenang pemerintah pusat meliputi enam bidang, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara wewenang dari Pemerintah Daerah yaitu, perencanaan dan pengendalian pembangunan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan

kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.

Pengeluaran pemerintah harus dilakukan guna membiayai berbagai aktifitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam perekonomian modern menurut Mangkoesoebroto (2008), peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar :

1. Peranan Alokasi

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi yang tidak dapat disediakan oleh swasta dilaksanakan secara efisien.

2. Peranan Distribusi

Peranan pemerintah dalam bidang distribusi adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan.

3. Peranan Stabilisasi

Peranan pemerintah dalam bidang stabilisasi adalah untuk mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi seperti pengangguran dan inflasi.

2.1.4.1 Hukum Wagner tentang Teori Pengeluaran Pemerintah

Hukum Wagner merupakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap *Gross National Product* (GNP) yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan

pendapatnya dalam suatu bentuk hukum sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini, Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi dan sebagainya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Government Expenditure}}{\text{Total Population}} = P_k PP \qquad \frac{\text{Gross Domestic Product}}{\text{Total Population}} = PPK$$

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

Keterangan:

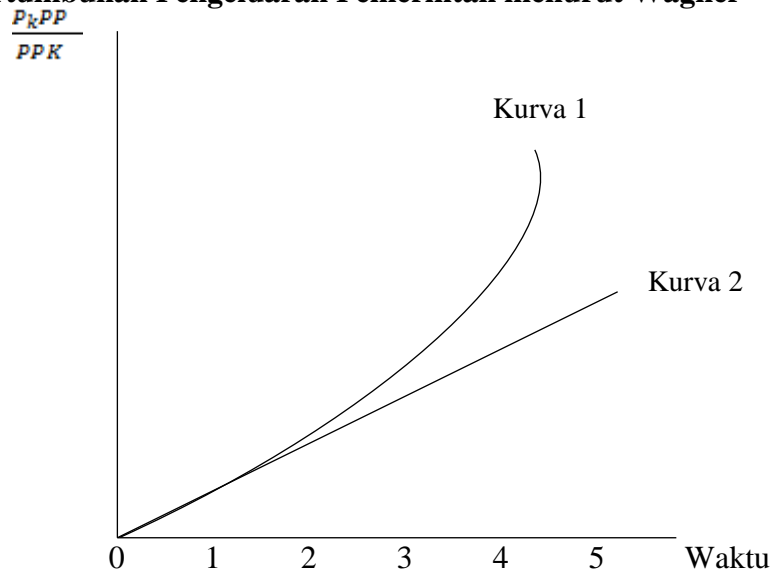
$P_k PP$ = Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK = Pendapatan perkapita

1,2,...n = Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam diagram berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh Kurva 1, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh Kurva 2.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

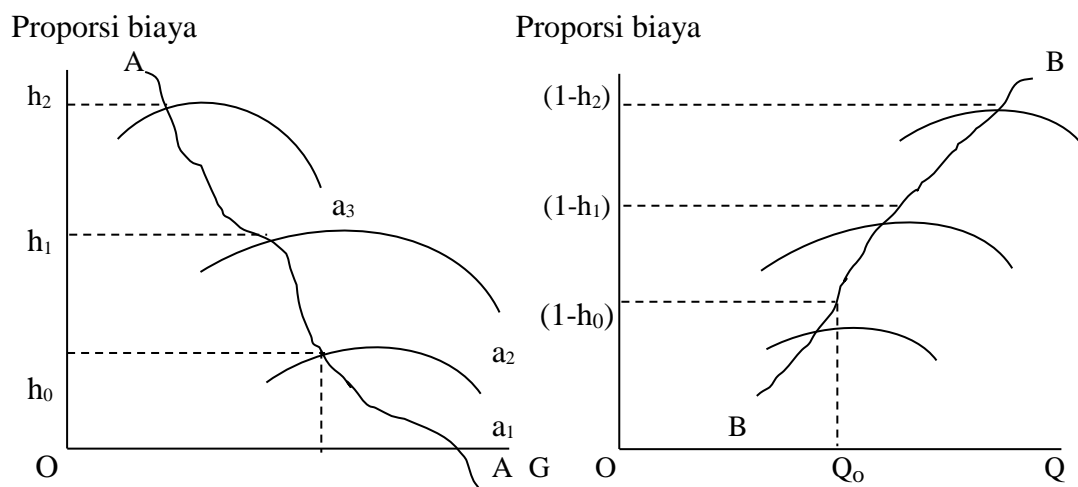


Sumber : Guritno Mangkoesoebroto, 2008

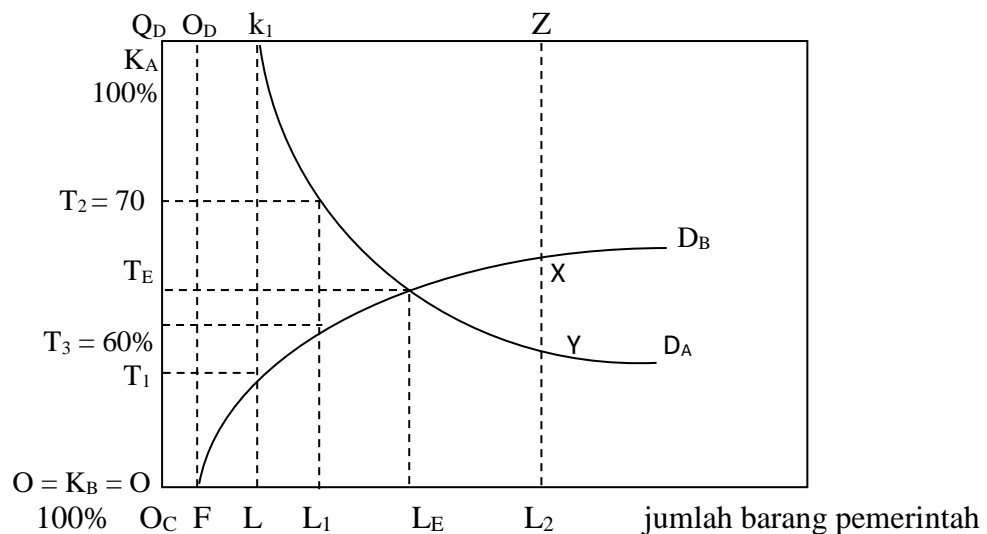
2.1.4.2 Teori Erick Lindahl tentang Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Lindahl adalah teori yang sangat berguna untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antara anggota masyarakat.

Gambar 2.2
Kurva Indifferens



Gambar 2.3
Solusi Erick Lindahl



Sumber : Guritno Mangkoesoebroto, 2008

Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utama dari analisa Lindahl ini adalah penggunaan kurva indiferens. Sifat barang publik (tidak dapat dikecualikan) menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya terhadap teori Lindahl adalah bahwa teori tersebut hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal.

2.1.4.3 Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makroekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

c. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pemabayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari pembangunan, yang mana kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri, kemiskinan adalah masalah yang banyak dihadapi khususnya ketika pasca krisis ekonomi tahun 1998.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan

kesejahteraan sekelompok orang. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

2.1.5.1 Indikator Kemiskinan

Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya ukuran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (BPS, 2009).

Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen (Kuncoro, 2003) yaitu :

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain BPS, UNDP dalam laporan *Human Development Report* 1997 memperkenalkan ukuran kemiskinan dimana ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivation*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan.(Safi'i, 2011).

2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (dalam Fahmi, 2012) adalah sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan mungkin dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.

Beberapa pandangan menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, dibutuhkan perilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai sumber daya yang tersedia. Tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari perbaikan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah (Hendarmin, 2012:148).

Selanjutnya menurut Todaro (2006), mengemukakan bahwa fungsi dari kesejahteraan (*welfare*) dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = w(Y, I, P)$$

Dimana W adalah kesejahteraan, Y adalah pendapatan per kapita yang berhubungan positif dengan fungsi kesejahteraan kita, I adalah ketimpangan dan berhubungan negatif, dan P adalah kemiskinan absolut dan juga berhubungan negatif. Ketiga komponen ini mempunyai signifikansi yang berbeda-beda, dan perlu mempertimbangkan ketiga elemen ini semua untuk mendapatkan penilaian menyeluruh terhadap kesejahteraan di negara berkembang.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat

dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Grubel (1998) menyatakan bahwa statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan manusia tidaklah sempurna, hal itu telah mendorong *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial untuk negara-negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro, 2006). Indikator IPM jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut.

Elizabeth (dalam Yasa dan Arka, 2015), IPM telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan:

1. Sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan.
2. Sebagai alternatif untuk PDB perkapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan antarnegara dan antar waktu.

Salah satu keuntungan IPM yaitu indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara atau daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2006).

2.1.6.1 Komponen-Komponen IPM

Indeks Pembangunan Manusia diukur menggunakan tiga komposisi indikator, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita pertahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Pendidikan

X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari setiap indeks nya harus dihitung terlebih dahulu dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i) = \{X(i) - X(i)_{\min}\} / \{X(i)_{\max} - X(i)_{\min}\}$$

Dimana : $X(i)$ adalah indikator ke-i ($i=1,2,3$)

$X(\max)$ adalah nilai maksimum $X(i)$

$X(i)_{\min}$ adalah nilai minimum $X(i)$

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup (e_0)	25	85
Angka Melek Huruf	0	100
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	0	15
<i>Purchasing Power Parity</i>	360.000	737.720

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP 2004

2.1.6.2 Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel (e_0) diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2.1.6.3 Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf/ *Adult Literacy Rate Index* (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ *Mean Years Of Schooling Index* (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2.1.6.4 Indeks Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjuisted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia menggunakan “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” (*adjuisted real per capita expenditure*) atau daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity*)

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh

masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

2.1.7 Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya mencakup sumber-sumber pendapatan daerah, berbagai pengeluaran pemerintah dan pembiayaan daerah yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan APBD kabupaten/kota merupakan bentuk dari aktualisasi fungsi pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat dalam bentuk penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Tiga aspek pokok dari kebijakan APBD ini yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Ketiganya akan memberikan implikasi yang berbeda pada pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada satu sisi kebijakan penerimaan daerah harus mampu menekan distorsi ekonomi daerah dan pada sisi yang lain kebijakan belanja harus bisa memberikan efek *multiplier* ekonomi yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat (Kusreni dan Suhab, 2009).

Mengenai kapasitas fiskal, Simanjuntak (2003) mengungkapkan bahwa kapasitas dengan penggunaan pendapatan aktual daerah sebagai ukuran kapasitas fiskalnya ternyata kurang baik karena akan menyebabkan transfer dari pusat ke daerah banyak dipengaruhi oleh upaya perpajakan (*tax effort*) daerah. Dengan demikian, daerah-daerah akan terdorong untuk tidak bersusah payah menghimpun pendapatan (*under-collect*) agar bisa memperoleh transfer yang banyak dari pusat.

Oleh karena itu, daerah yang semakin gencar menghimpun penerimaan pajak dari sumber-sumbernya, semakin tinggi ukuran kapasitas fiskalnya, dan semakin kecil transfer yang akan diterimanya.

Komponen pendapatan daerah yang difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari dana bagi hasil daerah yang dalam hal ini merupakan kapasitas fiskal yang benar-benar dihasilkan dari daerah itu sendiri. Komponen ini berpotensi menciptakan distorsi ekonomi, kalau tidak diterapkan secara hati-hati karena selain dapat melemahkan daya beli masyarakat, juga dikhawatirkan menurunkan kemampuan produksi barang dan jasa perusahaan karena meningkatnya *cost* dan rendahnya *demand*. Kusreni dan Suhab (2009) menjelaskan hubungan yang positif dan searah yang mengindikasikan sumber-sumber pendapatan daerah dari PAD serta bagi hasil pajak dan bukan pajak (SDA) belum atau tidak bersifat distorsif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah daerah atau alokasi belanja modal daerah merupakan suatu bentuk investasi pada sektor publik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum, dimana disamping memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program-program padat karya yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Ketersediaan sejumlah infrastruktur ekonomi yang baik akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efektivitas kesejahteraan sosial dapat tercapai seiring peningkatan dari pengeluaran pemerintah (Kenworthy, 2009).

Mirza (2012), menjelaskan hubungan yang positif antara belanja modal dan kesejahteraan masyarakat melalui keterkaitan antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat dimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Sedangkan penelitian dari Badruddin (2011), menjelaskan hubungan yang tidak signifikan antara belanja modal dan kesejahteraan masyarakat yang berarti bahwa belanja modal sebagai komponen belanja langsung terhadap total pendapatan daerah yang akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat akan terkendala sehingga alokasi belanja modal pada APBD menjadi investasi jangka panjang yang tidak produktif.

Sasana (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan dan pemihakan alokasi belanja daerah bagi peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar adalah keniscayaan bagi pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi. Indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian output dan kualitas layanan yang semakin baik dapat menjadi penunjang berbagai aktivitas baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Sehingga hasil, manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung

atau tidak langsung bagi kepentingan sebesar-besarnya rakyat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pilihan kebijaksanaan pembiayaan daerah yang berorientasi pada pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada belanja daerah akan menciptakan kebijaksanaan pembiayaan surplus. Sebaliknya, belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan kebijaksanaan pembiayaan daerah yang defisit. Dalam teori keuangan publik mengekspektasikan hubungan terbalik (tidak searah) antara pembiayaan daerah dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, jika pembiayaan surplus (positif, pendapatan > belanja) maka kesejahteraan masyarakat menurun. Sebaliknya, pembiayaan defisit (negatif, pendapatan < belanja) maka kesejahteraan masyarakat meningkat.

2.1.8 Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan akan tetap menjadi tantangan yang besar terhadap upaya-upaya pembangunan.

Adanya kebijakan mengenai tujuan dari pengurangan kemiskinan yaitu, penurunan dari kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik di dalam proses pembangunan. Sebaliknya, besarnya kemiskinan absolut dapat menjadi pendorong negatif materi dan psikologis yang sama kuatnya terhadap kemajuan ekonomi (Todaro, 2006).

Kemiskinan sendiri yang diungkapkan oleh Sen (dalam Mirza, 2012) mengungkapkan bahwa terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam mendidik anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak (kesehatan). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksi dari angka IPM.

Adanya pengaruh kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksi dari IPM sejalan dengan penelitian dari Mirza (2012), yang mengatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan yaitu apabila kemiskinan mengalami penurunan maka akan meningkatkan IPM.

Program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan mengurangi kemiskinan secara langsung. Dengan menggeser pendapatan, pajak, dan pengalihan kebijakan kepada masyarakat yang lebih rendah membawa beberapa masyarakat di atas garis kemiskinan (Kenworthy, 2015). Pada umumnya, negara dengan penurunan kemiskinan yang rendah terdapat pada pengeluaran untuk masyarakatnya yang rendah. Negara dengan pengeluaran tinggi akan menurunkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Kesejahteraan sosial yang tinggi akan dapat mengurangi kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Rudy Badruddin (2011) “ <i>Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare</i> ”.	Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.	<i>Partial Least Square (PLS) Analysis</i> $\eta_1 = \gamma_1 \xi_1 + \zeta_1$ $\eta_2 = \beta_1 \eta_1 + \gamma_2 \eta_1 + \zeta_2$ $\eta_3 = \beta_2 \eta_2 + \beta_1 \eta_1 + \gamma_3 \xi_1 + \zeta_3$ $x_1 = \lambda x_1 \xi_1 + \delta_1$ $\xi_1 = \lambda y_1 \eta_1 + \varepsilon_1$ $\xi_2 = \lambda y_2 \eta_2 + \varepsilon_2$ $y_{31} = \lambda y_{31} \eta_3 + \varepsilon_3$ $y_{32} = \lambda y_{32} \eta_3 + \varepsilon_4$	Desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, (5) belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2.	Denni Sulistio Mirza (2012) “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.”	Kemiskinan (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), Belanja Modal (X_3), Indeks Pembangunan Manusia (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda $IPMit = \alpha_i + B_1 KMSit + B_2 GRWTit + B_3 \ln BMODit + uit$	Hasil analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3.	Sri Kusreni dan Sultan Suhab (2009) “Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di	Kapasitas Fiskal (X_1), Alokasi Belanja Modal (X_2), Pembiayaan Daerah (X_3),	Regresi Linear Berganda $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it}$	Kapasitas fiskal berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal berhubungan positif dan

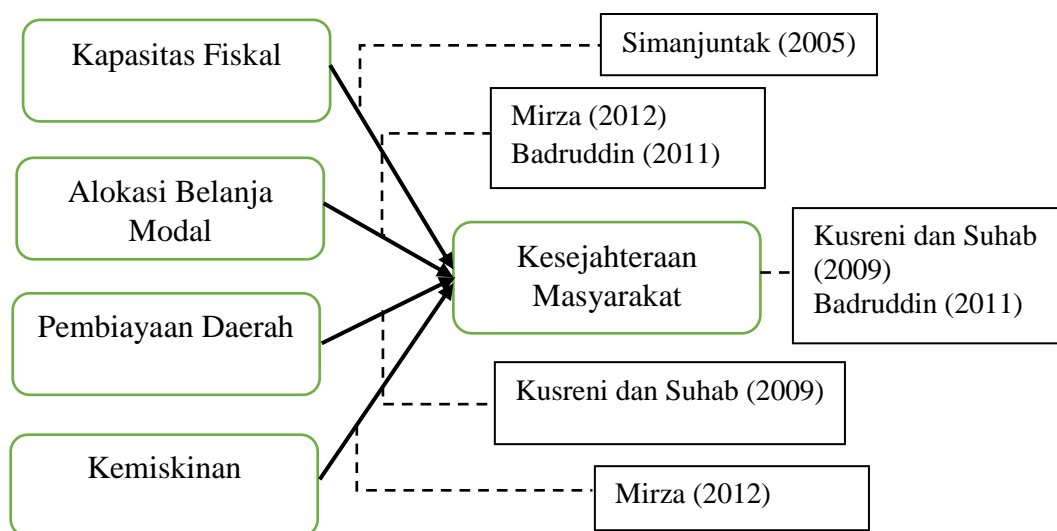
	Provinsi Sulawesi Selatan.”	Kesejahteraan Masyarakat (Y).		berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan daerah berhubungan negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
4.	Krismiati Tasrin dan Putri Wulandari (2012) “Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”	Desentralisasi (Fiskal, Fungsional, Personil) dan Kesejahteraan Masyarakat.	Analisis Panel Least Square (PLS) $Y = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 DFis + \hat{\alpha}_3 DFunc + \hat{\alpha}_4 DP + \hat{\alpha}_5 Invest + \hat{\alpha}_6 TK + \hat{\alpha}$	<p><i>Di bidang ekonomi</i>, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel <i>desentralisasi fiskal</i>, <i>fungsional</i>, dan <i>personel</i>. Meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi.</p> <p><i>Di bidang infrastruktur</i>, hanya variabel desentralisasi personil yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur jalan. <i>Di bidang Pendidikan</i>, terdapat dua variabel desentralisasi (fungsional dan personil) yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas. <i>Di bidang kesehatan</i>, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk, tapi memiliki</p>

				<p>pengaruh terhadap rasio tempat tidur di Rumah Sakit terhadap penduduk. Dari sini terlihat bahwa saluran (<i>channel</i>) dari variabel desentralisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil. Namun demikian kinerja kedua saluran (<i>channel</i>) inipun tetap harus ditingkatkan untuk kedepannya.</p>
5.	<p>Esmi Warassih (2007) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Mensejahterakan Rakyat.”</p>	<p>APBD, Keadilan, Diskriminatif, Kesenjangan Sosial</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>	<p>APBD yang tidak mencerminkan keadilan dan bersifat diskriminatif akan terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar. Munculnya kelompok rentan, marjinal, ketidakberdayaan masyarakat semakin luas dan seterusnya. Diharapkan APBD merupakan cerminan aspirasi dan kebutuhan semua penduduk yang ada di wilayah bukan segelintir manusia. Disamping upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik yaitu penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan adil agar APBD dapat memberikan dampak positif baik di masyarakat dan</p>

6.	Hadi Sasana (2012) “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.”	Belanja Pemerintah Daerah (X_1), Pendapatan Perkapita (X_2), Indeks Pembangunan Manusia (Y).	Analisis <i>Least Square Dummy Variable</i> . $IPM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BLJ_{it} + \alpha_2 PPK_{it} + u_{it}$	lingkungannya. Pertama, pengeluaran pemerintah memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua, pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.
7.	Zulia Hanum (2011) “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai.”	Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan SiLPA.	Analisis Deskriptif dan Analisis Komperatif	Pendapatan daerah Kabupaten Serdang Bedagai terjadi peningkatan tetapi lebih banyak diperoleh dari dana perimbangan yang artinya tingkat ketergantungan masing tinggi. Belanja daerah masih banyak diperuntukkan kepentingan aparatur sehingga kesejahteraan masyarakat masih rendah. SiLPA yang meningkat dari tahun ketahun menunjukkan belanja lebih kecil daripada pendapatan sehingga belum memihak kepada rakyat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Sri Kusreni dan Sultan Suhab (2009) dengan modifikasi

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka (yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu), merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti (Pedoman Penyusunan Skripsi, 2008:27). Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana satu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997).

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel Kapasitas Fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Diduga variabel Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Diduga variabel Pembiayaan Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Diduga variabel Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menerima dampak dari adanya variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang diduga akan mempengaruhi atau menyebabkan adanya perubahan yang timbul pada variabel dependen (variabel terikat).

Variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan Masyarakat yang disimbolkan dengan (Y).
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kapasitas Fiskal (KF), Alokasi Belanja Modal (ABM), Pembiayaan Daerah (PD) dan Kemiskinan (Kms).

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Sugiyono (2009) ialah suatu variabel yang menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa,

sehingga variabel tersebut bersifat spesifik (tidak berinterpretasi ganda) dan terukur (*observable* atau *measurable*). Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kapasitas Fiskal : Mengikuti Simanjuntak (2003), kapasitas fiskal (KF) terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (bagi hasil perpajakan dan bagi hasil sumber daya alam) daerah karena yang benar-benar dihasilkan dari daerah itu sendiri dibagi dengan total belanja daerah. Dinyatakan dalam persen.

Alokasi Belanja Modal : Alokasi Belanja Modal (ABM) merupakan investasi pada sektor publik dimana pengeluaran yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Pendekatan ini mengikuti penelitian dari Rudi Badruddin (2011) menggunakan rasio ABM dengan total pendapatan daerah. Dinyatakan dalam persen.

Pembiayaan Daerah : Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dinyatakan dalam rupiah.

Kemiskinan : Mengikuti penelitian dari Mirza (2012), kemiskinan (Kms) yang dimaksud adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dinyatakan dalam persentase penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan.

Kesejahteraan Masyarakat : Kesejahteraan masyarakat (KM) adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini mengikuti penelitian

Kusreni dan Suhab (2009). Dinyatakan dalam persen.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian (Riduan, 1997). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu (Soeratno dan Arsyad, 2003). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*pooling data*) atau data longitudinal. Data Panel (data longitudinal) adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

1. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2009-2013 bersumber dari Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2. Data Kemiskinan pada kurun waktu tahun 2009-2013 bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.
3. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kurun waktu tahun 2009-2013 bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

3.3.2 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
2. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
3. *United National Development Programme* (UNDP).
4. Lembaga / instansi lain yang terkait dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara mengumpulkan teori dan konsep dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumen yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serta pengambilan data dari lembaga-

lembaga terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan lembaga lain yang terkait.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data panel. Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat (Nachrowi dan Usman, 2002).

Model data panel merupakan persamaan model dengan menggunakan data silang tempat (*cross section*) dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan persamaan model dengan data silang waktu (*time series*) yaitu :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana T adalah banyaknya data *time series*.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

$$I = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Ada 3 teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu :

1. Model *Pooled Least Square (Common Effect)*

Model *Pooled Least Square* dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *cross section* dan *time series*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga

memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*Fixed Effect*) atau *Least Square Dummy Variable* atau disebut juga *Covariance Model*.

Pada metode *Fixed Effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati, 2005). Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data. Pemilihan model antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

3. Model Efek Acak (*Random Effect*)

Pendekatan model data panel ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Karena

hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen *error (error component model)*.

Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan efek tetap ataupun acak ditentukan dengan menggunakan Uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *fixed effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *fixed effect* dengan *random effect*.

3.5.1 Estimasi Model Regresi

Penelitian mengenai pengaruh kebijaksanaan APBD (kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, dan pembiayaan daerah) dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah, didasarkan dari penelitian Kusreni dan Suhab (2009) menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan metode estimasi model melalui pendekatan *random effect* yang menggunakan data *time series* selama 5 (lima) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2009-2013 dan data *cross section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kombinasi atau pooling menghasilkan 175 observasi. Dengan model fungsi persamaan dasar data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\mathbf{KM} = \mathbf{f}(\mathbf{KF}, \mathbf{ABM}, \mathbf{PD}, \mathbf{Kms}) \dots \dots \dots 3.4$$

Untuk merubah persamaan menjadi persamaan regresi yang mengikuti penelitian dari Kusreni dan Suhab (2009) dan Mirza (2012), didapat persamaan sebagai berikut: Kapasitas Fiskal (KF), Alokasi Belanja Modal (ABM), Pembiayaan Daerah (PD) dan Kemiskinan (Kms)

$$\mathbf{KM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln KF_{it} + \beta_2 \ln ABM_{it} + \beta_3 \ln PD_{it} + \beta_4 \ln Kms_{it} + e_{it} \dots \dots \dots 3.5$$

Dimana dalam persamaan di atas i merupakan unit *cross section* kabupaten/kota dan t menunjukkan periode waktu. Model ini akan dijelaskan sebagai berikut :

- KM= Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui proksi sesuai yang digunakan oleh Sri Kusreni dan Sultan Suhab (2009) dan Rudy Badruddin (2011) dalam penelitiannya, dengan proksi dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).
- KF = Mengikuti Simanjuntak (2003), kapasitas fiskal daerah diukur melalui rasio PAD + dana bagi hasil daerah dengan total belanja daerah.
- ABM = Alokasi Belanja Modal, sejalan dengan penelitian Badruddin (2011) diukur dengan rasio antara belanja modal daerah dengan total pendapatan daerah.
- PD = Pembiayaan Daerah diukur menggunakan pembiayaan netto.
- Kms = Kemiskinan diukur dari penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (untuk penelitian ini digunakan data kemiskinan yang bersumber dari BPS Jawa Tengah) sejalan dengan penelitian dari Mirza (2012).
- e = Error

Fungsi di atas menjelaskan pengertian bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang diproksi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipengaruhi oleh Kapasitas Fiskal (KF), Alokasi Belanja Modal (ABM), Pembiayaan Daerah (PD) dan Kemiskinan (Kms) serta variabel lain di luar model. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa variabel lain diluar variabel penelitian tidak berubah (*ceteris paribus*).

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan kesimpulan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel–variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen

sama dengan nol. Pengujian ini akan menggunakan *Collinearity Statistics* dengan melihat nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $tolerance < 0,1$ menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,1$ menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik *plot* menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik *plot* tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Atau uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan Uji Glejser (Ghozali, 2011), dengan dasar pengambilan keputusan :

- tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

- terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

3.5.2.4 Uji Autokolerasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). Pengujian menggunakan uji Durbin-Watson untuk melihat gejala autokolerasi.

Hipotesanya adalah :

H_0 : Tidak ada autokorelasi positif

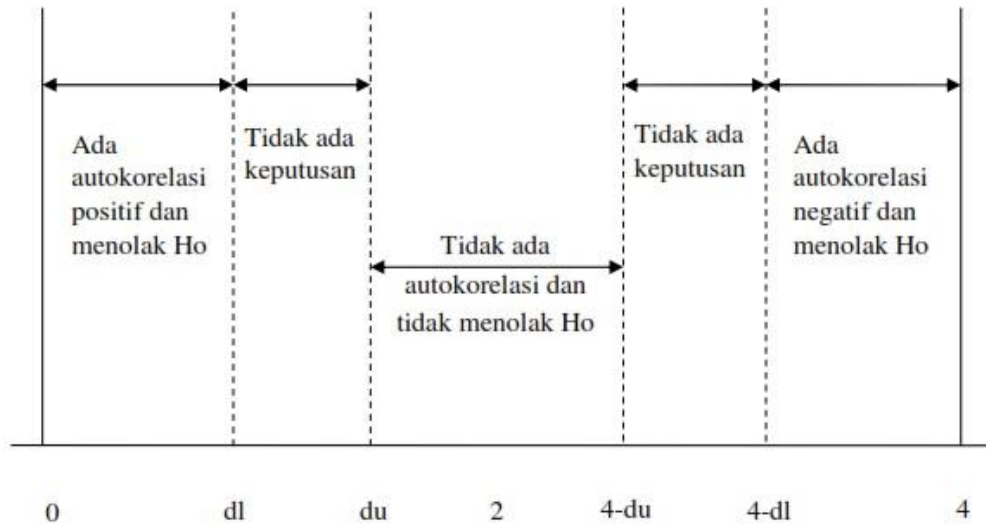
H_0^* : Tidak ada autokorelasi negatif

Kriteria pengujiaanya adalah sebagai berikut :

1. Bila D-W statistik terletak antara $0 < d < dl$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
2. Bila D-W statistik terletak antara $4 - dl < d < 4$, H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
3. Bila D-W statistik terletak antara $du < d < 4 - du$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
4. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif bila $dl \leq d \leq du$

5. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif bila $du \leq d \leq 4 - dl$

Gambar 3.1
Kriteria Pengujian Durbin-Watson



Sumber : Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*, 1999

3.5.3 Pengujian Statistik

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel independen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*), digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\sum(Y_1 - \bar{Y})^2}$$

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

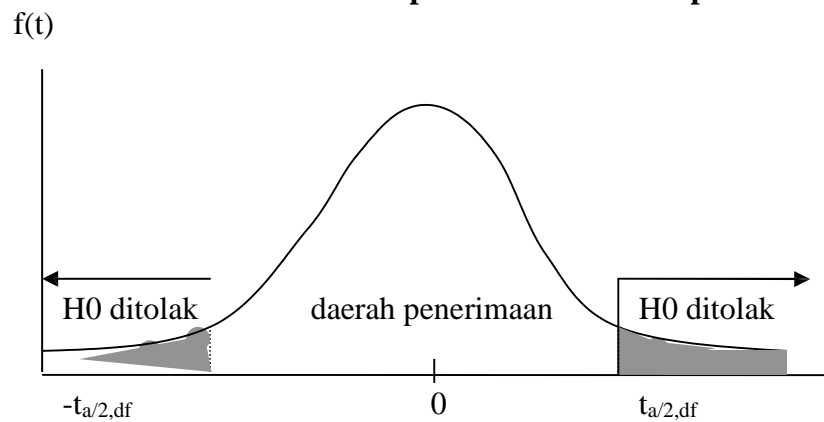
- (a) Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas dan sangat terbatas.
- (b) Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

3.5.3.2 Uji Statistik t (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

1. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh parsial variabel desentralisasi fiskal terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.
2. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh parsial variabel desentralisasi fiskal terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.2
Daerah kritis dan penerimaan suatu hipotesis



Dalam gambar di atas terlihat bahwa hipotesis nol diterima bila berada dalam daerah selang keyakinan ($-t_{\alpha/2, df} < t_{stat} < t_{\alpha/2, df}$) yang berarti variabel independen tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel independen, dan begitupun sebaliknya.

3.5.3.3 Uji Statistik F (Uji F)

Uji F statistik digunakan untuk menguji variabel secara bersama-sama. Bila signifikan berarti tinjauan statistik menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat kepercayaan tertentu. Uji F dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.